

## INTISARI

Studi ini menganalisis strategi dan teknik-teknik yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upayanya merevitalisasi kebudayaan sunda di Purwakarta. Upaya tersebut tidak terlepas dari peran Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai aktor utama yang menginisiasi wacana revitalisasi kebudayaan sunda tersebut. Sejak awal kepemimpinannya hingga periode kedua jabatannya sekarang, wacana penguatan kembali kebudayaan sunda ini semakin menguat di Purwakarta. Hal ini mengindikasikan adanya operasi kekuasaan yang bekerja di dalamnya. Studi ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana kekuasaan bekerja di dalam praktik-praktik penguatan kembali (*revitalisasi*) kebudayaan sunda di Kabupaten Purwakarta tersebut dan mengetahui efek-efek dari bekerjanya kekuasaan dalam upaya revitalisasi kebudayaan sunda itu terhadap legitimasi simbolik Bupati Purwakarta sebagai Kepala Pemerintahan Daerah.

Studi ini melihat kebudayaan dari perspektif politik, yaitu sebagai sesuatu yang tidak bersifat *given* tetapi dibentuk sesuai kepentingan para aktor. Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan observasi atau pengamatan lapangan.

Hasil studi mengungkapkan bahwa kekuasaan dalam upaya revitalisasi kebudayaan Sunda di Kabupaten Purwakarta bekerja melalui kombinasi antara model kekuasaan hegemonik dengan model kekuasaan *governmentality*. Kekuasaan dalam model hegemonik di Purwakarta dilakukan dengan menciptakan wacana tandingan (*counter hegemony*) terhadap wacana-wacana yang menghegemoni masyarakat sunda selama ini dan melakukan revolusi moral dan intelektual melalui sistem kepemimpinan yang diterapkan oleh Bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta. *Counter Hegemony* ini dilakukan dengan 2 (dua) teknik yaitu teknik dekontruksi dan teknik pembedaan identitas. Sementara itu, kekuasaan dalam model *governmentality* dijalankan oleh rezim pemerintah dengan menciptakan kebijakan dan program-program yang berfungsi sebagai sarana pendisiplinan sosial untuk mendapatkan kepatuhan kepada rezim pemerintah.

Kedua model kekuasaan itu bekerja saling mengisi dan menjadikan kesundaan kembali menguat di Kabupaten Purwakarta. Kombinasi kedua model ini memungkinkan kekuasaan yang dijalankan dapat terus lestari dan menghasilkan efek-efek positif sesuai kepentingan rezim yang berkuasa. Di Kabupaten Purwakarta kekuasaan yang bekerja dalam upaya revitalisasi kebudayaan sunda ini secara umum telah menghasilkan efek positif berupa meningkatnya legitimasi simbolik Bupati Purwakarta sebagai kepala daerah dan aktor utama dibalik upaya revitalisasi kebudayaan sunda tersebut.

**Kata Kunci:** *Kekuasaan, Kebudayaan Sunda, Legitimasi Simbolik, Hegemony, Governmentality.*

## ABSTRACT

This study analyzes techniques and strategy that are applied by Government of Purwakarta in their effort to revitalize Sundanese culture in Purwakarta. The effort is inseparable from the role of Dedi Mulyadi being the Governor of Purwakarta as the main actor that initiates the discourse of Sundanese culture revitalization. Since the beginning of his leadership until his second period of leading at the moment, the reinforcement of Sundanese culture is strongly increasing in Purwakarta. This indicates that there is power operation that works inside it. This study attempts to describe how power works within the practice of Sundanese culture revitalization in Purwakarta and to recognize effects of how power works within efforts of Sundanese culture revitalization against symbolic legitimacy of Purwakarta's Governor as Leader of Local Government.

This study examines culture from political perspective, which is as something that is not given but is formed to fit actors' interests. This study uses qualitative type of research with the use of phenomenology as its research design. Data collection is done by doing interviews, documents research and field observation.

The result of study revealed that the power within effort of Sundanese culture revitalization in Purwakarta worked through a combination between hegemonic power model and governmentality power model. The power in hegemonic model in Purwakarta is done by creating counter hegemony against discourses that dominate Sundanese society all this time and by doing moral and intellectual revolutions through leadership system that is used by Head of District Dedi Mulyadi in Purwakarta. Counter Hegemony is done by 2 (two) techniques, which are deconstruction and distinction of identity. Meanwhile, the power in governmentality model is applied by government by creating policy and programs that function as means of social discipline to obtain obedience to the government.

Both power models complete each other and make dominance of Sundanese culture increase strongly in Purwakarta. Combination of both models enables the applied power to be sustainable and to produce positive effects that suits interest of regime that reigns. In Purwakarta the power that works within effort of Sundanese culture revitalization generally has produced positive effect in the form of increased symbolic legitimacy of Head of Purwakarta as Leader of Local Government and as the main actor behind the effort of Sundanese culture revitalization.

**Keywords:** *Power, Sundanese Culture, Symbolic Legitimacy, Hegemony, Governmentality.*